

Implikasi Kurikulum Merdeka Terhadap Layanan Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah (*Literatur Review*)

Fitria Lailatul Jannah¹, Irma Maulani¹, Triamariska Septiara Ma'rifah¹, Ariadi Nugraha²,
Mustika Sari Nurul Huda³

^{1,2}Universitas Ahmad Dahlan,³SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta

Key Words:

Kurikulum Merdeka, Layanan Bimbingan dan Konseling

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis implikasi Kurikulum Merdeka terhadap layanan bimbingan dan konseling di sekolah dengan desain penelitian tinjauan pustaka atau literature review. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan kurikulum pendidikan terbaru Indonesia yang dikembangkan sebagai fondasi pendidikan pasca Covid-19. Dalam penerapan kurikulum ini, guru BK dibebani peran penting untuk mengoptimalkan perkembangan berpikir siswa. Dalam praktiknya, guru BK diharapkan dapat memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa dengan memasukkan materi-materi yang lebih mutakhir dan relevan dengan kemajuan zaman. Guru BK di era Kurikulum Merdeka juga dituntut untuk lebih menekankan pada kesejahteraan psikologis siswa serta mewujudkan Profil Pelajar Pancasila pada diri siswa.

How to Cite: Jannah, Maulani, Ma'rifah. (2023). Implikasi Kurikulum Merdeka Terhadap Layanan Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah (*Literatur Review*). *Seminar Nasional Pengenalan Lapangan Persekolahan UAD*.

PENDAHULUAN

Dinyatakan dalam UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan adalah usaha terencana yang secara sadar dilakukan dalam rangka menciptakan suasana belajar yang mendukung keaktifan siswa dalam mengembangkan potensinya guna membangun spiritualitas, akhlak mulia, kepribadian, dan pengendalian diri serta keterampilan lain yang diperlukan dirinya secara pribadi maupun di masyarakat. Pendidikan secara sistematis merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa unsur yang saling berkaitan secara fungsional untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan sendiri adalah membentuk seluruh kualitas yang penting bagi siswa agar mereka dapat mencapai tingkat kebahagiaan yang maksimal sebagai individu dan anggota masyarakat (Pristiwanti et al., 2022).

Pendidikan menjadi faktor penting dalam memperbaiki mutu sumber daya manusia dan kemudian bagi kemajuan suatu bangsa. Dilihat dari mutu pendidikan itu sendiri, pengembangan kurikulum sangatlah penting karena merupakan landasan dari jalannya suatu pendidikan (Rahayu et al., 2022). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Ayat 1 menyatakan bahwa Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran serta metode yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu". Kurikulum secara sempit dapat dimaksudkan sebagai jumlah mata pelajaran yang harus diselesaikan siswa agar dapat lulus dalam suatu satuan pendidikan. Sedangkan secara luas, kurikulum dimaknai sebagai seluruh pengalaman belajar yang ditawarkan kepada peserta didik pada suatu lembaga pendidikan tertentu (Astuti, 2018). Secara ringkas dapat dikatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat peraturan mengenai visi dan misi pendidikan yang dijalankan.

Kurikulum pendidikan mempunyai orientasi dan fungsi. Pane & Aly (2023) mendeskripsikan orientasi dan fungsi kurikulum yang meliputi: 1) orientasi budaya, dimana hasil proses pendidikan diharapkan dapat mewariskan kebudayaan masyarakat dari generasi ke generasi. Kedua, orientasi personal, dimana pembelajaran di sekolah diasumsikan memberikan kesempatan kepada siswa untuk

bertindak baik secara individu maupun kelompok. Ketiga, orientasi profesional, dimana hasil pembelajaran diharapkan dapat memberikan siswa keterampilan bersaing dalam kehidupan profesional. Keempat, orientasi sosial yang berasumsi bahwa hasil proses belajar akan menghasilkan individu yang mampu bertahan. Kelima, orientasi ekonomi, dimana hasil pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kompetensi siswa sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa/negara.

Kurikulum pendidikan bersifat dinamis sehingga dapat berubah sewaktu-waktu untuk mengikuti perkembangan zaman. Sejak tahun 1945 hingga tahun 2023, kurikulum pendidikan di Indonesia sudah berubah kurang lebih 10 kali. Perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia ini diawali dengan Kurikulum 1947, Kurikulum 1952, Kurikulum 1964, Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum Berbasis Kompetensi (2004), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (2006), Kurikulum 2013, dan yang terbaru adalah Kurikulum Merdeka (2022) (Ananda & Hudaidah, 2021).

Program Merdeka Belajar kebijakan yang baru diresmikan oleh Kemendikbud di tahun 2019 dengan menyinggung konsep kebebasan belajar. Nadiem Makarim menyatakan kemerdekaan belajar merupakan kebebasan dalam berpikir yang dikembangkan untuk mengikuti perkembangan zaman. Kunci dari Kurikulum Merdeka adalah hadirnya pembelajaran internal yang serbaguna dengan konten pembelajaran inti yang lebih dalam sehingga memungkinkan siswa memperdalam konsep dan memperkuat keterampilannya dengan lebih efektif dan efisien.

Secara umum, Kurikulum Merdeka Belajar dirancang untuk memberikan pembelajaran yang lebih bermakna kepada siswa. Dikatakan pula bahwa program kurikulum mandiri tidak berarti menggantikan program yang berjalan, namun akan memperbaiki sistem yang sudah ada. Kebebasan belajar yang digagas Kemendikbud menawarkan proses pembelajaran yang lebih sederhana, dimana lebih menekankan pada proses belajar yang dapat dilaksanakan secara indoor maupun outdoor (Firdaus dkk., t.t.).

Bimbingan dan konseling menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan untuk mencapai tujuan Kurikulum Merdeka. Peran penting tersebut pada dasarnya sudah terintegrasi dengan tujuan bimbingan dan konseling sendiri, yaitu. pengembangan optimal potensi peserta didik dalam ranah pribadi, sosial, akademik, dan karir. Untuk dapat berperan besar dalam program ini, seorang guru BK dituntut untuk memahami dan menguasai kompetensi dasar seorang pendidik (Mustaghfiroh, 2020). Terkait dengan hal ini, guru harus membekali dirinya dengan kualifikasi profesional sesuai Pasal 28 ayat (6) Peraturan Pendidikan Nomor 19 Tahun 2005, yang mana keempat kompetensi tersebut adalah pedagogi, pribadi, sosial, dan profesional. Kualifikasi tersebut disusun secara profesional berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 27 Tahun 2008 tentang Persyaratan Kualifikasi Akademik dan Kualifikasi Konselor (Peraturan Menteri Pendidikan, 2008) (Kurniawan dkk., t.t.)

Secara umum, Nursalim (2015) mengidentifikasi peran konselor sekolah sebagai sosok-sosok berikut ini: a) Konselor sebagai konselor atau terapis. b) Konselor sebagai penasehat bagi guru, orang tua atau siswa itu sendiri. c) Konselor sebagai agen perubahan dengan membantu peserta didik menjaga kesehatan mental. d) Konselor sebagai agen preventif utama e) Konselor sebagai koordinator kegiatan sekolah agar lebih optimal bagi siswa. f) Konselor yang mengenalkan siswa pada sekolah. g) Konselor sebagai asesor melakukan penilaian siswa. h) Konselor sebagai pengembang karir dengan membantu siswa mengembangkan rencana karir.

Kurikulum Merdeka Belajar dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang lebih berkualitas unggul dan memiliki daya saing global. Sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing dapat diwujudkan dengan mengembangkan peserta didik yang berakhlak mulia dan bernalar mendalam melalui pendalaman kemampuan membaca dan berhitung (Khoirurrijal et al., 2022). Sehubungan dengan tujuan pendidikan tersebut, guru BK mempunyai peranan penting untuk mewujudkan kesejahteraan psikologis siswa dan

mendorong perkembangannya sehingga dapat memetakan potensi yang dimilikinya secara optimal. Selain itu, guru BK juga terus memperkuat Profil siswa Pancasila (Mufidah & Widyastuti, 2021).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa terdapat implikasi antara Kurikulum Merdeka pada pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Melalui kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai implikasi penerapan Kurikulum Merdeka terhadap layanan bimbingan dan konseling melalui tinjauan literatur jurnal nasional yang diterbitkan. Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat dipantai manfaat dari dijalankannya Kurikulum Merdeka terhadap kemajuan siswa di Indonesia usai Pandemi Covid-19.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain literature review atau tinjauan pustaka. Desain penelitian ini berisi uraian teoritis terhadap hasil penelitian lain yang diperoleh.. Tinjauan pustaka ini dapat mencakup abstrak, ringkasan, dan pemikiran penulis tentang suatu topik yang dibahas di beberapa sumber perpustakaan. Dalam menggunakan metode tinjauan pustaka, peneliti menggunakan sumber yang relevan, terkini, dan memadai (Harahap, 2014).

Berdasarkan penjelasan diatas proses penelitian ini ditujukan untuk menyusun pembahasan yang akan menjadi bahan pengkajian penelitian melalui pengumpulan jurnal yang berhubungan dengan kata kunci Kurikulum Merdeka, berdasarkan pada layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan di sekolah. Pada penelitian ini jurnal yang digunakan sebanyak 5 jurnal nasional yang mana berkaitan erat dengan kata kunci yang dipilih, dan jurnal ini didapatkan dari pencarian google scholar. Data yang ditampilkan berupa tabel yang mencakup judul, tujuan, metode penelitian dan hasil dari penelitiannya. Pemilihan jurnal memiliki topik yang serupa yang kemudian dianalisis dan hasil dari rangkuman tersebut disajikan dalam satu analisis yang menyeluruh pada jurnal ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil data yang dikumpulkan pada literature review ini merupakan hasil dari analisis yang dirangkum dan dijelaskan secara rinci dalam bentuk tabel. Berikut ini pembahasan mengenai Implikasi Kurikulum Merdeka Terhadap Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta.

Tabel 1. Hasil Penelitian Literature Review Implikasi Kurikulum Merdeka Terhadap Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah

NO	PENELITI	TUJUAN	METODE	HASIL PENELITIAN
1	(Restu Rahayu dkk, 2022)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penerapan Kurikulum Merdeka di sekolah penggerak.	Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif, yaitu deskripsi hasil observasi dan tanya jawab.	Di dalam Kurikulum Merdeka, guru diberi kebebasan untuk berkreasi dalam mengajar dan berkesempatan untuk lebih mengetahui minat dan bakat, kebutuhan

				dan kemampuan siswa. Di dalam prosesnya di sekolah, Kurikulum Merdeka ini ditujukan untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten dan mengedepankan nilai-nilai karakter Profil Pelajar Pancasila.
2	(Adeliya Putri Ananda & Hudaidah, 2021)	Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia sejak tahun 1945 hingga 2023	Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah.	Perubahan yang terjadi tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam perjalanannya. Seiring berjalannya waktu, kurikulum di Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangan setidaknya 10 kali sejak awal kemerdekaan
3	(Mardiani Pane & Hery Noer Aly, 2023)	Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang arah dan fungsi program pendidikan.	Peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data dan menganalisis data yang berupa penemuan ilmiah tersebut.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pendidikan mempunyai orientasi dan fungsi yang sangat komprehensif. Orientasi dan fungsi ini berupa orientasi budaya, orientasi personal, orientasi karir,, orientasi sosial, dan orientasi ekonomi.
4	(Esty Rokhyani, 2022)	Tujuan dari penelitian ini yaitu mengkaji kesiapan guru BK dalam menghadapi tantangan merdeka belajar serta strategi yang dapat dilakukan untuk menerapkannya dalam prose layanan bimbingan dan konselingr.	Desain penelitian ini adalah Literature Review dengan metode perpustakaan.	Hasil penelitian menjelaskan bahwa 1) Guru BK harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik dalam memberikan layanan; 2) Strategi bimbingan dan konseling yang sesuai

				untuk program belajar mandiri.
5	(Mochamad Nursalim, 20220	Tujuan dari artikel ini yaitu menganalisis pengaruh kebijakan Kurikulum Merdeka terhadap penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di sekolah.	Artikel ini disusun memiliki desain <i>literature review</i> melalui analisis artikel ilmiah.	Guru/konselor bimbingan harus merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi layanan bimbingan dan bimbingan sesuai dengan Kebijakan Merdeka Belajar. Hal ini karena guru BK memegang peranan penting dalam menjalankan Kurikulum Merdeka Belajar.

Strategi program merdeka belajar merupakan inovasi besar di dalam kebijakan pendidikan di Indonesia karena menyesuaikan kebutuhan peserta didik pasca pandemi Covid-19. (Arifin & Muslim, 2020). Sebagaimana dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran merupakan ‘dari dan bersama siswa’. Ciri-ciri kemerdekaan belajar ini tidak jauh berbeda dengan hakikat kemandirian, yang ciri utamanya adalah kemandirian pribadi dan sosial. Pembelajaran mandiri versus pembelajaran mandiri juga dapat dikenali dengan hadirnya beberapa indikator, kepentingan, kualitas, transformasi, perluasan, penerapan, efektivitas, kemajuan, keragaman, faktual dan realistik. (Abidah et al., 2020).

Rokhyani (2022) mengungkapkan bahwa guru BK dalam Kurikulum Merdeka didorong untuk memiliki kesiapan seorang guru yang komprehensif dan integral sesuai dengan kompetensi guru BK. Hal ini dilakukan karena Indonesia memiliki target yang tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, menyiapkan masyarakat 5.0 dan generasi emas 2045. Berkenaan dengan hal itu, Kurikulum Merdeka meminta guru untuk tidak hanya memberikan pendampingan secara fisik, tetapi juga psikologis siswa agar mereka dapat mengembangkan potensi secara optimal.

Dalam wujud mengimplementasikan layanan bimbingan dan konseling dalam setting Kurikulum Merdeka, guru bimbingan konseling diharuskan menguasai berbagai hal. Hal-hal tersebut yaitu: Expansion of Electronics, dimana layanan BK didukung dengan bantuan media elektronik; Growth of Distance Learning, dimana belajar terbatas ruang dan waktu; Emphasis on Competencies and Skills, dimana kompetensi dan profesionalitas guru BK; Standards-based Education, dimana guru BK harus lulusan lembaga pendidikan yang memenuhi standar dari organisasi profesi; Inculcation of Lifelong Learning, dimana guru BK dituntut untuk selalu belajar sepanjang hayatnya.

Di dalam praktiknya, berbagai kegiatan yang dapat dilakukan guru BK dalam memberikan layanannya dengan berdasarkan Kurikulum Merdeka. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyono (2022) merangkum ragam layanan bimbingan dan konseling dalam menguatkan Profil Pelajar Pancasila yang terintegrasi dengan Kurikulum Merdeka itu sendiri. Ragam layanan bimbingan dan konseling ini yaitu sebagai berikut:

1. Layanan Dasar (Bimbingan klasikal/lintas kelas/kelompok): Mengembangkan keterampilan dan membangun karakter melalui layanan bimbingan klasikal/antar kelas/kelompok atau melalui

berbagai informasi yang dipublikasikan melalui papan orientasi, layar berisi kata-kata bijak, jejaring sosial, dll.

2. Peminatan dan Perencanaan Individual (Bimbingan klasikal/lintas kelas/kelompok): Mendukung siswa dalam mengidentifikasi dan mengembangkan minat, bakat, dan kemampuannya, terutama dalam menentukan jenjang pendidikan pasca sekolah menengah dan menentukan mata pelajaran pilihan pada tingkat sekolah menengah atas dan mengidentifikasi jurusan pada tingkat sekolah menengah kejuruan.
3. Responsif (Konseling individu/kelompok): Memberikan dukungan terhadap permasalahan siswa berupa konseling dan mitigasi permasalahan khususnya permasalahan yang berkaitan dengan kepribadian siswa.
4. Dukungan Sistem (Asesmen Psikologis): Menyiapkan asesmen kepribadian yang sesuai dengan kepribadian siswa Pancasila. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pencapaian kepribadian siswa. Pembimbing juga dapat berkolaborasi dengan guru untuk mengembangkan proyek yang memperkuat portofolio siswa Pancasila. Proyek ini dirancang untuk mengembangkan karakter, oleh karena itu peran konsultan merupakan bagian integral dari program studi mandiri.

Secara lebih lengkap, implikasi Kurikulum Merdeka terhadap layanan BK terangkum pada hasil penelitian Nursalim (2022) Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh dua belas kebijakan dalam Kurikulum Merdeka terkait layanan dan peran guru BK. Hasil penelitian tersebut secara singkatnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Cita-Cita Kebijakan Merdeka Belajar, Layanan BK baik difokuskan pada pengembangan karakter siswa..
2. Capaian Merdeka Belajar, Materi layanan BK utamanya pada peningkatan Profil Pelajar Pancasila yang meliputi keimanan dan ketaqwaan, serta akhlak mulia, kemandirian, berpikir kritis, kreatif, gotong royong, dan kebhinekaan global, .
3. Program Sekolah Penggerak, Guru BK mendukung kesuksesan kegiatan program sekolah penggerak
4. Transformasi Sekolah, Guru BK mendukung terciptanya suasana sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan bagi siswa, serta merencanakan program dan anggaran berbasis refleksi diri.
5. Sistem Zonasi PPDB, Guru BK, memberikan informasi tentang sistem zonasi PPDB, serta memberikan konseling pada siswa yang membutuhkan, serta mendampingi siswa yang tidak terakomodasi
6. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimal (AKM) dan Survey Karakter, Guru BK menjadi koordinator survey karakter siswa, memberikan informasi tentang karakter dan asesmen karakter, memberikan pelatihan membaca skimming dan scanning, memberikan pelatihan penguasaan literasi dan numerasi, serta pelatihan berpikir kritis, pengembangan kreativitas, dan literasi media.
7. Penyederhanaan RPP/RPL, Guru BK mengikuti pelatihan dan diseminasi hasil pelatihan.
8. Membuat Platform Pendidikan Berbasis IT, guru BK mengembangkan e-LBK, menjadi fasilitator kegiatan BK yang dilaksanakan secara daring, serta menjadi content creator tentang BK.
9. Membangun Sekolah Masa Depan yang Aman dan Eksklusif, Guru BK mendukung sekolah ramah anak dengan menangani kasus perundungan.
10. Heutagogi (Self Determinate Learning), guru BK memberikan bimbingan dan konseling kepada siswa yang belum terbiasa belajar secara mandiri agar dapat lebih mandiri di masa depan.
11. Guru Penggerak, Guru BK aktif mengikuti program guru penggerak.
12. Pendekatan Berbasis Kebutuhan Individu dan Berpusat pada Siswa, Guru BK melaksanakan perencanaan individual dan peminatan

Program Merdeka Belajar yang dirancang oleh Nadiem Makarim berawal dari pemikiran John Dewey yang meyakini bahwa masyarakat harus mampu mengikuti perkembangan zaman dan oleh

karena itu pendidikan juga harus beradaptasi dengan perubahan kondisi zaman. Hal ini sesuai dengan konsep pendidikan sepanjang hayat yang menekankan bahwa pendidikan harus menyesuaikan dengan kondisi zaman. Dalam praktik layanan bimbingan dan konseling, salah satu bentuk implementasi konsep mengikuti perkembangan zaman ini yaitu dengan menyediakan layanan secara daring/ non tatap muka. Hayati (2022) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pemberian layanan secara daring ini dapat dilakukan melalui media Whatsapp Group, Google Classroom, Google Form, Google Meet, Email, dsb. Berbagai media ini dapat digunakan untuk mengunggah/mengunduh materi, konseling/diskusi secara maya, atau asesmen secara daring yang dapat dilakukan baik oleh guru maupun siswa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian pustaka terhadap berbagai jurnal yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa penerapan Kurikulum Merdeka ini memiliki implikasi yang cukup signifikan terhadap layanan bimbingan dan konseling. Implikasi Kurikulum Merdeka ini tidak hanya pada layanan bimbingan dan konseling saja, tetapi juga pada peran guru BK itu sendiri. Guru BK dalam Kurikulum Merdeka ditekankan untuk lebih banyak belajar, khususnya pada penggunaan teknologi karena layanan bimbingan dan konseling di masa kini dan masa depan akan semakin banyak menggunakannya, dan perkembangannya semakin pesat. Selain itu, guru BK juga dibebani berbagai tugas-tugas baru seperti menjadi guru penggerak serta membantu sekolah menciptakan lingkungan yang sehat secara fisik dan psikologi bagi siswa-siswanya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan artikel ini, penulisan pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada DPL yang telah membimbing penulis dalam menyusun artikel ini. Penulis juga mengucapkan kepada pihak sekolah SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan serta ide kepada penulis untuk dapat mengembangkannya menjadi artikel ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada penulis-penulis jurnal yang karyanya dapat dimanfaatkan penulis di dalam artikel ini. Di luar nama-nama tersebut, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak lain yang telah mempermudah dan melancarkan penulis dalam menyusun artikel ini secara tidak langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, A., Hidaayatullah, H. N., Simamora, R. M., Fehabutar, D., Mutakinati, L., & Suprpto, N. (2020). The impact of covid-19 to indonesian education and its relation to the philosophy of “merdeka belajar”. *Studies in Philosophy of Science and Education*, 1(1), 38-49. <https://doi.org/10.46627/sipose.v1i1.9>

- Ananda, A. P., & Hudaidah. (2021). Perkembangan Kurikulum Pendidikan Indonesia dari Masa ke Masa. *Sundang: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah*, 3(2), 102-108. <https://doi.org/10.31540/sindang.v3i2.1192>.
- Arifin, S., & Muslim, M. O. H. (2020). Tantangan implementasi kebijakan “merdeka belajar, kampus merdeka” pada Perguruan Tinggi Islam Swasta di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 3(1). <https://doi.org/10.32529/al-ilmi.v3i1.589>
- Astuti, A. (2018) *Buku Landasan Pengembangan Kurikulum*. Bandung : Rafa Production
- Cahyono, T. (2022). Implementasi Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Penguatan Profil Pelajar Pancasila. *Prophetic: Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal*, 5(2), 125-134. <http://dx.doi.org/10.24235/prophetic.v5i2.12782>
- Harahap, H. S. (2014). *Metodologi studi tokoh & penulisan biografi*. Prenada Media.
- Hayati, L. M. (2022). Paradigma Guru Bimbingan Konseling Pada Kurikulum Merdeka Belajar. *JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)*, 7(1), 158. <https://doi.org/10.29210/021880jpgi0005>
- Mufidah, E. F., & Widyastuti, A. (2021). Konselor Sebaya dalam Keterbatasan Waktu Konselor Memberikan Layanan Bimbingan dan Konseling Di Era Pandemi Covid 19. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 4(1), 27-32.
- Mustaghfiroh, S. (2020). Konsep “merdeka belajar” perspektif aliran progresivisme John Dewey. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 3(1), 141-147.
- Nursalim, M. (2015). Peningkatan Peran dan Kinerja Konselor untuk Pemberdayaan Bimbingan dan Konseling di Sekolah. *Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling PD ABKIN Jatim*, tanggal 8 Februari 2015.
- Nursalim, M. (2015). *Pengembangan Profesi Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT Erlangga.
- Nursalim, M. (2022). Implikasi Kebijakan Merdeka Belajar bagi Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling. *Prosiding Seminar & Lokakarya Nasional bimbingan dan Konseling*. 19-25. Surabaya. PD ABKIN JATIM & UNIPA
- Pane, M., & Aly, H. N. (2023). Orientasi dan Fungsi Kurikulum dalam Pendidikan. *Journal on Education*, 5(3), 6165–6171. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1388>
- Pristiwanti, D., Badariah, B., Hidayat, S., & Devi, R. S. (2022). Pengertian Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6), 7911-7915. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9498>
- Rahayu, R., Rosita, R., Rahayuningsih, Y. S., Hernawan, A. H., & Prihantini, P. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6313–6319. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3237>
- Rokhyani, E. (2022). Penguatan Praksis Bimbingan Konseling dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar. *Prosiding Seminar & Lokakarya Nasional bimbingan dan Konseling*. 26-38. Surabaya. PD ABKIN JATIM & UNIPA